

**ANALISIS MANFAAT BASIS AKRUAL DAN BASIS KAS MENUJU
AKRUAL DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN INTERNAL
PEMERINTAH DAERAH**

(Studi Empiris Pada SKPD di Kota Solok)

SKRIPSI

*Diajukan sebagai Salah Satu Syarat dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*



Oleh:

INESSA TRIHANI
2013/1306992

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI SOLOK
2018**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

**Analisis Manfaat Basis AkruaI dan Basis Kas Menuju AkruaI dalam
Pengambilan Keputusan Internal Pemerintah Daerah
(Studi empiris pada SKPD di Kota Solok)**

Nama : Inessa Trihani
TM/NIM : 2013/1306992
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi

Padang, 23 Januari 2018

Disetujui oleh:

Pembimbing 1,



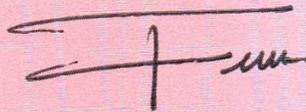
Dr. Efrizal Syofyan, SE, M.Si., CA, Ak
NIP. 19580519 199001 1001

Pembimbing 2,



Vita Fitria Sari, SE, M.Si
NIP. 19870515 201012 2009

Mengetahui
Ketua Jurusan Akuntansi



Fefri Indra Arza, SE, M.Sc. Ak
NIP. 19730213 199903 1 003

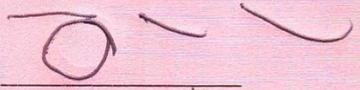
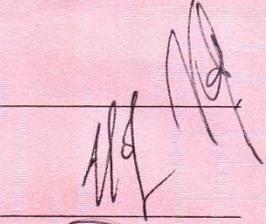
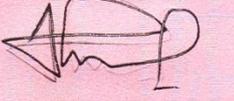
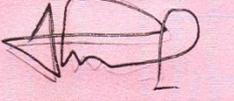
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

*Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Ujian Skripsi
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang*

Judul : Analisis Manfaat Basis AkruaI dan Basis Kas Menuju AkruaI
dalam Pengambilan Keputusan Internal Pemerintah Daerah
(Studi empiris pada SKPD di Kota Solok)
Nama : Inessa Trihani
TM/NIM : 2013/1306992
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi

Padang, 23 Januari 2018

Tim Penguji

No Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	: Dr.Efrizal Syofyan,SE,M.Si,CA,Ak	1. 
2. Sekretaris	: Vita Fitria Sari,SE,M.Si	2. 
3. Anggota	: Nayang Helmayunita,SE,M.Sc	3. 
4. Anggota	: Henri Agustin ,SE.M.Sc,Ak	4. 

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Inessa Trihani
NIM/Th. Masuk : 1306992/2013
Tempat / Tanggal Lahir : Medan/ 10 April 1995
Jurusan : Akuntansi
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Solok
No. Hp/Telephone : 082169096895
Judul Skripsi : Analisis Manfaat Basis Akrual dan Basis Kas Menuju Akrual dalam Pengambilan Keputusan Internal Pemerintah Daerah (*Studi empiris pada SKPD di Kota Solok*)

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis/skripsi ini adalah hasil dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (sarjana) baik di UNP maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis/skripsi ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan tim pembimbing.
3. Pada karya tulis/skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali tertulis dengan jelas dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Karya tulis/skripsi ini **Sah** apabila telah ditandatangani **Asli** oleh tim pembimbing, tim penguji dan ketua jurusan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran di dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima **sanksi akademik** berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena karya tulis/skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Padang, 23 Januari



Inessa Trihani
NIM : 1306992/2013

**ANALISIS MANFAAT BASIS AKRUAL DAN BASIS KAS MENUJU
AKRUAL DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN INTERNAL
PEMERINTAH DAERAH**

(Studi Empiris Pada SKPD di Kota Solok)

Inessa trihani

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Solok
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus Air Tawar Solok
Email : inessathani10@gmail.com / 082169096895

ABSTRAK

This research aimed to identify the difference in perceptions about the benefits of accrual basis and cash base towards accrual in the internal decision making. This type of research is comparative studies with a total of 156 samples of respondents. A classic assumption test in use include a test of normality, test its homogeneity. Test the hypothesis on this research using a T-Test different trials. The results of the research indicates that: (1) there is a difference in accrual basis and cash base towards accrual in the internal decision making area.(2) accrual Basis is more beneficial than the cash basis towards accrual in the internal decision-making of local government in the city of Solok

Keywords: *Accrual Basis, Accrual Basis Towards Accrual, Accounting Basis, Internal Decision Making*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi perbedaan persepsi tentang manfaat basis akrual dan basis kas menuju akrual dalam pengambilan keputusan internal. Jenis Penelitian ini adalah penelitian komparatif dengan total jumlah sampel 156 responden. Uji asumsi klasik yang di pakai meliputi uji normalitas, Uji Homogenitas. Uji hipotesis pada penelitian ini menggunakan uji beda T-Test. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Terdapat perbedaan basis akrual dan basis kas menuju akrual dalam pengambilan keputusan internal daerah. (2) Basis akrual lebih bermanfaat dibandingkan basis kas menuju akrual dalam pengambilan keputusan internal pemerintah daerah di kota Solok

Kata kunci: **Basis Akrual, Basis Kas Menuju Akrual, Basis Akuntansi, Pengambilan Keputusan Internal**

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kemudahan pada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Manfaat Basis Akrual Dan Basis Kas Menuju Akrual Dalam Pengambilan Keputusan Internal Pemerintah Daerah” (Studi Empiris Pada SKPD di Kota Solok)**

Skripsi ini merupakan salah satu syarat guna menyelesaikan pendidikanprogram studi S-1 dan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Solok.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu, perkenankan penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr.Efrizal Syofyan,SE,M.Si,CA,Ak selaku pembimbing I dan Ibu Vita Fitria Sari, SE,M.Si selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan transfer ilmu kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Bapak Fefri Indra Arza, S.E, M.Sc, Ak dan Bapak Henri Agustin S.E, M.Sc, Ak selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Solok.
3. Ibu Erly Mulyani, SE,M.Si selaku dosen Penasehat Akademik (PA).
4. Staf dosen serta karyawan/ karyawan/ karyawati Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Solok. Khususnya Program Studi Akuntansi serta karyawan yang telah membantu penulis selama menuntut ilmu di kampus ini serta yang telah mengarahkan dan membantu penulis dalam mendapatkan data selama penelitian ini.
5. Pegawai perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Solok

6. Teristimewa kepada Papa dan Mama serta abang M.Yogi Optidaya S.S.T.Pel dan kakak Rika Utami Restihani,SE dan keluarga besar yang telah memberikan perhatian, semangat, do'a, dorongan dan pengorbanan baik secara moril maupun materil hingga penulis dapat menyelesaikan studi dan skripsi ini.
7. Teman-teman TerSayang Nisa Mahmud, Diana Pumket, Yunel Cireng, NurAzizah sama-sama telah membantu dan berjuang bersama.
8. Sahabat TerCinta Team Gemesh, Nirmala Ginta, Yopi Sandra, Jacky Rahmat, Adit, Widya, yang selalu memberikan semangat serta motivasi kepada penulis untuk segera menyelesaikan skripsi.
9. Kakak Reliya Emilda,Kak Aisah, Abg bass, Abang Antony,Abang Fauzan, Imam Arif yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi dan memberikan motivasi
10. Semua sahabat seperjuangan di Prodi Akuntansi angkatan 2013 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Solok Serta semua pihak yang telah membantu dalam proses perkuliahan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga bantuan, bimbingan dan petunjuk yang bapak/ibu dan rekan - rekan berikan menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Penulis telah menulis semaksimal mungkin untuk skripsi ini, namun apabila pembaca masih menemukan kekurangan, maka penulis memohon adanya saran dan kritikan.

Padang , 23 Januari 2018

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL, DAN HIPOTESIS	
A. Kajian Teori.....	10
1. Teori Institusional.....	10
2. Basis Akuntansi	12
3. Tujuan dan Fungsi Laporan Keuangan Sektor Publik.....	25
4. Pemakai Laporan Keuangan Sektor Publik.....	29
5. Perbedaan Basis Kas Menuju AkruaI dan Basis AkruaI.....	30
6. Perdebatan Penggunaan Basis AkruaI dalam Pemerintah Daerah.....	32
7. Penelitian terdahulu	35
8. Hubungan Basis Akuntansi dengan Pengambilan Keputusan Internal.....	37
B. Kerangka Konseptual	38
C. Hipotesis	40

BAB IKII METODELOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	41
B. Populasi dan Sampel.....	41
C. Jenis dan Sumber Data	44
D. Teknik Pengumpulan Data	44
E. Pengukuran Variabel	45
F. Instrumen Penelitian	45
G. Uji instrumen	47
H. Uji Asumsi Klasik	48
I. Teknik Analisis Data	49

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	52
B. Demografi Responden	53
1. Karakteristik Responden.....	53
2. Teknik Analisis Data	55
3. Uji Validitas dan Reliabilitas.....	66
4. Pengujian Hipotesis	72
C. Pembahasan Hipotesis	72

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	76
B. Keterbatasan Penelitian	76
C. Saran	77

DAFTAR PUSTAKA	78
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN.....	80
----------------------	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Perbandingan Manfaat Basis Kas dan Basis AkruaI	30
2. Daftar Nama SKPD Pemerintah Kota Solok	42
3. Skor Jawaban untuk Setiap Pernyataan	45
4. Kisi- kisi Instrumen.....	46
5. Penyebaran dan Pengembalian Kuesioner	52
6. Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	53
7. Jumlah Responden Berdasarkan Umur	53
8. Jumlah Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir.....	54
9. Manfaat basis akuntansi dalam berbagai pengambilan keputusan internal SKPD di Kota Solok.....	56
10. Penggunaan akuntansi akrual dan sistem akuntansi kas	62
11. Distribusi Frekuensi Basis Kas Menuju AkruaI SKPD Kota Solok	64
12. Distribusi Frekuensi Basis AkruaI SKPD di Kota Solok.....	65
13. Uji Validitas Basis Kas Menuju AkruaI.....	67
14. Uji Validitas Basis AkruaI	68
15. Uji Reabilitas Basis Kas Menuju AkruaI	69
16. Uji Reabilitas Basis AkruaI.....	69
17. One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test	70
18. Test of Homogeneity of Variances	71
19. Independent Samples Test	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Konseptual	39

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Kuesioner	80
2. Tabulasi Data Penelitian	85
3. Uji Validitas & Realibilitas	92
4. Uji Asumsi Klasik	94
5. Uji Beda	95

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebutuhan standar akuntansi khususnya sektor publik terus berkembang, hal yang terjadi dalam perkembangan sektor publik di Indonesia adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan Negara. Sebagai upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara salah satunya adalah dengan melakukan pengembangan kebijakan akuntansi pemerintah berupa standar akuntansi pemerintahan (SAP). Salah satu bentuk perkembangan akuntansi sektor publik adalah pada tahun 2004 di Indonesia masih menggunakan sistem pencatatan *single-entry*. Sistem *double-entry* baru diterapkan pada 2005 seiring dengan terbitnya paket undang-undang keuangan negara yaitu UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, dan UU No 15 Tahun 2004 dan peraturan pemerintah 24 Tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan (selanjutnya disebut SAP) berbasis kas menuju akrual.

Menurut Feryono (2016) standar akuntansi pemerintah (SAP) bertujuan untuk memberikan pedoman pokok dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah serta menyatukan persepsi antara penyusun, pengguna, dan auditor. Penerapan SAP diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan di pemerintah pusat dan daerah. Ini berarti informasi keuangan pemerintahan akan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan di pemerintahan dan diharapkan terwujudnya transparansi dan akuntabilitas.

Pemerintah menerbitkan (PP) No.24 tahun 2005 menetapkan bahwa sistem akuntansi yang digunakan oleh pemerintahan di Indonesia adalah sistem kas menuju akrual (*cash basis toward accrual*) Menurut Simanjuntak (2005) basis kas menuju akrual adalah basis akuntansi yang dikembangkan di Indonesia sebagai transisi menuju basis akrual penuh, dengan cara menggunakan basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam LRA dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca. Menurut Erlina (2015) Akuntansi berbasis kas menuju akrual merupakan proses transisi. Dengan basis ini, pendapatan, belanja, dan pembiayaan dicatat berdasarkan basis kas, sedangkan aset, utang, dan ekuitas dana dicatat berdasarkan basis akrual (PP No. 24 tahun 2005).

Berdasarkan Lampiran II Peraturan pemerintah 71 Tahun 2010 manfaat kas menuju akrual adalah menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran, menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan, menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai, menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya, dan menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.

Pelaksanaan akuntansi keuangan daerah menurut PP 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan sebagai pengganti PP Nomor 24 Tahun 2005, merupakan regulasi pemerintah yang mengatur penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual murni meskipun didalam peraturan tersebut juga masih diakomodir pilihan menerapkan basis kas menuju akrual sebagaimana yang diatur didalam PP Nomor 24 tahun 2005 selama masa transisi dimana pelaksanaan akrual murni paling tidak harus diterapkan paling lambat empat (4) tahun setelah peraturan ini diterbitkan. Atau dalam hitungan waktu akan mulai penuh diterapkan pada tahun 2015. Aturan ini sebelumnya juga telah dimuat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dimana pemerintah diwajibkan menerapkan basis akuntansi akrual paling lambat tahun anggaran 2008, atau 5 tahun sejak UU Nomor 17 Tahun 2003 tersebut diundangkan. Penggunaan basis akrual penuh juga sesuai dengan basis akuntansi yang dianut dalam *International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)*.

Akuntansi berbasis akrual, yaitu suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Dalam akuntansi berbasis akrual, waktu pencatatan (*recording*) sesuai dengan saat terjadinya arus sumber daya, sehingga dapat menyediakan informasi yang paling komprehensif karena seluruh arus sumber daya dicatat. *Study* Nomor

14 *IFAC Public Sector Committee* (2002) menyatakan bahwa pelaporan berbasis akrual bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja pemerintah terkait biaya jasa layanan, efisiensi, dan pencapaian tujuan. Dengan pelaporan berbasis akrual, pengguna dapat mengidentifikasi posisi keuangan pemerintah dan perubahannya, bagaimana pemerintah mendanai kegiatannya sesuai dengan kemampuan pendanaannya sehingga dapat diukur kapasitas pemerintah yang sebenarnya. Akuntansi pemerintah berbasis akrual juga memungkinkan pemerintah untuk mengidentifikasi kesempatan dalam menggunakan sumberdaya masa depan dan mewujudkan pengelolaan yang baik atas sumberdaya tersebut.

Kelebihan laporan keuangan berbasis akrual adalah (PP 71 tahun 2010) yaitu penyajian informasi keuangan yang lebih informatif, terutama dalam hubungannya dengan pengukuran kinerja pemerintah terkait biaya jasa layanan, efisiensi, dan pencapaian tujuan dalam periode akuntansi terkait. Memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan pemerintah untuk tujuan pengambilan keputusan; dan mengikuti *international best practices* dari negara-negara lain dan memenuhi amanat UU bidang Keuangan Negara.

Menurut Lamsoni (2016) berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual membawa perubahan besar dalam sistem pelaporan keuangan di Indonesia, yaitu perubahan dari basis kas menuju akrual menjadi basis akrual penuh dalam pengakuan transaksi keuangan pemerintah. Perubahan basis tersebut selain telah diamanatkan oleh paket Undang-Undang Keuangan Negara, juga diharapkan mampu

memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan, menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban, dan bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja.

Perubahan basis akuntansi dari basis kas ke basis akrual pada sektor pemerintahan dipandang sebagai bagian dari agenda *New Public Management* yang dirancang untuk mencapai kondisi operasi yang lebih menyerupai bisnis dan kinerja yang berfokus pada sektor publik. Para pendukung berpendapat bahwa akuntansi akrual menyediakan informasi yang lebih tepat bagi para pengambil keputusan dan akhirnya mengarah pada efektivitas dan efisiensi dan sektor publik (Hyndman and Connolly, 2011). Sedangkan NPM itu sendiri merupakan istilah kolektif yang digunakan untuk mengklasifikasikan reformasi yang luas pada sektor publik yang telah diperkenalkan pada banyak negara *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) sejak akhir 1970-an. Penelitian menunjukkan bahwa beberapa negara yang telah menerapkan NPM, kinerjanya lebih tinggi dan lebih antusias daripada negara yang lain (Hood, 1995). Di bidang akuntansi, banyak pemerintah yang menerapkan ide NPM juga mengadopsi akuntansi akrual. Tanpa akuntansi akrual, maka beberapa perbaikan dari penerapan NPM akan menjadi kurang optimal (Likierman, 2003).

Carnegie dalam Etrin (2010) menyatakan bahwa perubahan standar akuntansi sektor publik ke basis akrual dimotivasi oleh kebutuhan untuk meningkatkan akuntabilitas yang tinggi dalam insitusi sektor publik. Dengan adanya sistem baru kas menuju akrual, maka sistem tersebut menggantikan laporan keuangan berbasis kas yang telah dipraktekkan sejak zaman kolonial.

Suardjono(2013) menyatakan bahwa tujuan pelaporan keuangan salah satunya digunakan untuk membuat keputusan-keputusan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya, mengarahkan dan mengendalikan sumber daya suatu organisasi secara efektif. Pengambilan keputusan mengandung arti pemilihan alternatif terbaik dari sejumlah alternatif yang tersedia.

Berdasarkan informasi yang di akses melalui Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sumatebarat hasil pemeriksaan audit Laporan keuangan kota Solok untuk tahun 2014 mendapatkan opini wajar dengan pengecualian (WDP) sedangkan untuk hasil pemeriksaan audit laporan keuangan di tahun 2015 kota Solok memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Awal dari penerapan basis akrual untuk kota solok ditahun 2015 sudah meunjukkan bahwa kota Solok sudah mampu menerapkan perubahan dari motode basis kas menuju akrual ke basis akrual dengan baik, ini terlihat dengan opini yang terdapat pada opini audit laporan keuangan wajar tanpa pengecualian (WTP-murni)

Penelitian yang dilakukan oleh Barries &Feriyono (2016) menunjukan bahwa basis akrual, menurut responden, lebih bermanfaat daripada basis kas. Hasil tersebut sesuai dengan PP 71 Tahun 2010 yang mengatur tentang SAP berbasis akrual. Kementrian Keuangan Republik Indonesia juga menyatakan dalam Modul Gambaran Umum Akuntansi Berbasis Akrual bahwa basis akrual dapat memberikan informasi yang lebih baih dalam hal posisi keuangan pemerintah daerah, informasi mengenai hak dan kewajiban pemerintah daerah, dan dalam rangka mengevaluasi kinerja pemerintah daerah terkait biaya jasa layanan, efisiensi, dan pencapaian tujuan.

Penelitian Etrin (2012) membahas implementasi basis akrual dalam basis *cash towards accrual* pada laporan keuangan 35 pemerintah kota tahun anggaran 2007 – 2009. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa penyajian pos pos akrual tersebut yang belum memadai, dikarenakan oleh kurangnya peraturan teknis yang detail, dan ketidaksiapan pemkot untuk melaksanakannya. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan basis akrual belum mampu memberi manfaat secara maksimal terhadap pengambilan keputusan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi basis akuntansi mana (basis akrual atau basis kas menuju akrual) yang menurut para manajer sektor publik dan pengelola keuangan daerah dapat memberikan informasi lebih bermanfaat untuk pengambilan keputusan internal di pemerintah daerah. Penelitian tentang manfaat basis kas menuju akrual dan basis akrual dalam pengambilan keputusan internal masih jarang dilakukan di Indonesia, hal ini disebabkan penerapan basis akrual dimulai pada tahun anggaran 2015, namun demikian penelitian ini telah dilakukan di negara lain. Andriani, et.al (2010) menyatakan dalam penelitiannya di Australia bahwa basis akrual lebih bermanfaat bagi beberapa aktivitas pengambilan keputusan di pemerintah. Berdasarkan fenomena dan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “*Analisis Manfaat Basis Akrual dan Basis Kas Menuju Akrual Dalam Pengambilan Keputusan Internal Pada Pemerintah Daerah Pada SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Solok)*”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka penulis dapat merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana manfaat basis akrual dan basis kas menuju akrual dalam pengambilan keputusan internal pada pemerintah daerah?
2. Apakah terdapat perbedaan manfaat basis akrual dan basis kas menuju akrual dalam pengambilan keputusan internal pemerintah daerah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana manfaat basis akrual dan basis kas menuju akrual dalam pengambilan keputusan internal pada pemerintah daerah yang ada pada SKPD di Kota Solok
2. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan manfaat basis akrual dan basis kas menuju akrual dalam pengambilan keputusan internal pemerintah daerah yang ada pada SKPD di Kota Solok

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di Kota Solok, penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan internal bagi SKPD yang ada di Kota Solok.

2. Bagi penulis, Penelitian ini bisa digunakan sebagai penambahan wawasan penelitian sehingga peneliti bisa membandingkan antara teori yang diperoleh selama kuliah dan kenyataan di lapangan yang nantinya berguna di dalam pekerjaanselanjutnya dan menambah khasanah ilmu pengetahuan penulis

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL, DAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori

1. Teori Institusional

Teori institusional sangat erat kaitannya dengan sebuah lingkungan suatu organisasi. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Carruthers (1995) bahwa paham *new institutionalism* menggambarkan tentang struktur dari suatu organisasi dipengaruhi oleh lingkungan sosial dimana dia berada. Jadi, jika berbicara mengenai teori institusional, pasti berbicara juga mengenai bagaimana cara suatu organisasi tersebut menyesuaikan diri dengan lingkungannya.

Menurut DiMaggio dan Powell (1983), *isomorphism* adalah suatu proses yang memberikan batasan atau memaksa suatu organisasi agar menyerupai dengan organisasi yang lain dalam kondisi lingkungan yang sama. Akan tetapi, terkadang *isomorphism* tersebut akan memberikan tekanan institusional pada organisasi, karena mereka harus melakukan perubahan yang sama (homogenitas) merasa harus kerja keras untuk menjadi sama tersebut.

Menurut DiMaggio & Powell, 1983 terdapat 3 (tiga) macam bentuk *isomorphism*, yaitu:

a. *Mimetic Pressure*

Salah satu bentuk dari isomorfosisma institusional adalah tekanan mimetic (Teo et al., 2003 dalam Perdana, 2011). Tekanan mimetic atau kecenderungan untuk meniru perilaku pihak lain berasal dari adanya

informational cascades (Bikhchandhani et al., 1992 dalam Perdana, 2011) fenomena ini terjadi ketika individu yang memiliki informasi yang tidak sempurna bertindak secara sekuensial untuk memilih tindakan yang sama dengan pendahulunya dengan mengabaikan informasi pribadi yang mereka miliki, dan individu yang menghadapi dua pilihan keputusan yang memiliki kemiripan.

Dimaggio dan Powel (1983) berpendapat bahwa salah satu alasan struktur organisasi cenderung serupa adalah karena terdapat hanya sedikit model organisasi yang dapat ditiru. Oleh karena itu, upaya memilih struktur organisasi untuk menghadapi ambiguitas dan ketidakpastian seringkali didasarkan pada pola organisasi yang sama. Tekanan mimetic dapat menyebabkan organisasi berubah menjadi serupa dengan organisasi lain dalam lingkungannya. Tekanan mimetic memanifestasikan diri kedalam dua cara, yaitu prevalensi praktek dalam industri organisasi dan persepsi keberhasilan industri organisasi yang telah mengadopsi praktek tersebut (Haveman (1993) dalam Usman dan Rosidi (2012).

b. *Normative Pressure*

Tekanan normative muncul sebagai konsekuensi dari profesionalisme disebuah organisasi tertentu (Dimaggio dan Powell, 1983). Dimaggio dan Powell, 1983 mendefinisikan profesionalisme sebagai representasi secara kolektif oleh anggota dalam pekerjaan tertentu untuk menentukan cara-cara yang tepat dalam bertindak.

c. *Coersive Pressure*

Tekanan coercive menunjukkan bahwa organisasi mengambil beberapa cara untuk melakukan adopsi dikarenakan tekanan negara (pengaruh politik), organisasi yang memiliki kekuasaan lebih besar yang hal ini berdampak pada legitimasi.

Teori instisional *Coersive pressure* berhubungan dengan tekanan dari suatu negara, salah satunya yaitu perubahan yang terjadi pada sistem akuntansi sektor publik di negara Indonesia. Perubahan dari sistem basis kas menuju akrual menjadi basis kas yang kini telah diterapkan menunjukkan bahwa pemerintah melakukan adopsi dikarenakan salah satunya yaitu tekanan dari negara, teori instisional adalah suatu proses yang memberikan batasan atau memaksa suatu organisasi agar menyerupai dengan organisasi yang lain dalam kondisi lingkungan yang sama. Perubahan Sistem pencatatan akuntansi basis kas menuju akrual ke basis akrual di landasi dengan UU yang jelas, kesiapan pemerintah daerah dalam perubahan ini belum sepenuhnya bisa diadopsi oleh pemerintah daerah di Indonesia namun karena *coersive pressure* merupakan tekanan dari negara maka perubahan kebijakan sistem akuntansi dari basis kas menuju akrual ke basis kas ini harus wajib di implementasikan oleh seluruh pemerintah di Indonesia.

2. **Basis Akuntansi**

Basis akuntansi merupakan pilihan teknik pencatatan akuntansi yang berpengaruh besar terhadap informasi keuangan yang dihasilkan oleh setiap organisasi termasuk instansi pemerintahan, pilihan basis akuntansi

menentukan kapan dampak keuangan suatu transaksi atau kejadian di akui untuk tujuan laporan keuangan. Menurut PP 71 tahun 2010 basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca.

Menurut Erlina (2015) Basis akuntansi dalam akuntansi pemerintahan di Indonesia dimulai dengan akuntansi berbasis kas, dilanjutkan dengan akuntansi berbasis kas menuju akrual dan akuntansi berbasis akrual.

a. Basis kas

Akrual Basis merupakan salah satu konsep yang sangat penting dalam akuntansi, dimana pencatatan basis kas adalah teknik pencatatan ketika transaksi terjadi dimana uang benar-benar diterima atau dikeluarkan. Dengan kata lain akuntansi kas basis adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar yang digunakan untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Kas basis akan mencatat kegiatan keuangan saat kas atau uang telah diterima misalkan perusahaan menjual produknya akan tetapi uang pembayaran belum diterima maka pencatatan pendapatan penjualan produk tersebut tidak dilakukan, jika kas telah diterima maka transaksi tersebut baru akan dicatat seperti halnya dengan “dasar akrual” hal ini berlaku untuk semua transaksi yang dilakukan, kedua teknik tersebut akan

sangat berpengaruh terhadap laporan keuangan, jika menggunakan dasar akrual maka penjualan produk perusahaan yang dilakukan secara kredit akan menambah piutang dagang sehingga berpengaruh pada besarnya piutang dagang sebaliknya jika yang di pakai cash basis maka piutang dagang akan dilaporkan lebih rendah dari yang sebenarnya terjadi. Kas basis juga mendasarkan konsepnya pada dua pilar yaitu:

- 1) Pengakuan Pendapatan: Pengakuan pendapatan, saat pengakuan pendapatan pada cash basis adalah pada saat perusahaan menerima pembayaran secara kas.
- 2) Pengakuan Biaya: Pengakuan biaya, pengakuan biaya dilakukan pada saat sudah dilakukan pembayaran secara kas. Sehingga dengan kata lain, pada saat sudah diterima pembayaran maka biaya sudah diakui pada saat itu juga.: Contoh : pada tanggal 1 januari Pemda membayar sewa gedung sebesar 2.000.000 untuk 2 bulan, maka pada tanggal yang bersangkutan Pemda akan menjurnal beban sewa pada sisi debit (D) 2.000.000 dan kas pada sisi kredit (K) 2.000.000. Sedangkan dari jurnal pada akrual basis dapat terlihat bahwa pembayaran yang dilakukan terhadap pengeluaran sewa gedung sebesar 2.000.000 untuk masa 2 bulan, tidak langsung dianggap sebagai beban yang terjadi. Melainkan pengeluaran tersebut masih dianggap Pemda sebagai asset/harta dari pemda , hal ini dikarenakan pemda walaupun sudah membayar tetapi belum menerima manfaat dari aktivitas penyewaan gedung tersebut. Maka biasanya pada akhir periode tutup buku

bulanan, dalam hal ini pada tanggal 31 Januari dan 28 Februari, Pemda akan melakukan jurnal penyesuaian (adjustment) jurnal pada 31 Januari beban sewa pada sisi debit (D) 1.000.000 dan sewa dibayar dimuka pada sisi kredit (K) 1.000.0000.) jurnal pada 28 Februari beban sewa pada sisi debit (D) 1.000.000 dan sewa dibayar dimuka pada sisi kredit (K) 1.000.0000. Pada jurnal yang dicatatkan di tanggal 31 Januari dan 28 Februari dapat terlihat, bahwa Pemda melaporkan adanya beban sewa yang terjadi pada periode Januari dan Februari sebesar 1.000.000. Nilai 1.000.000 diperoleh dengan membagi pos sewa dibayar dimuka yang dikeluarkan pada tanggal 1 Januari sebesar 2.000.000 dibagi masa manfaat penyewaan selama 2 bulan.

Disamping itu, pencatatan akuntansi dengan metode kas basis juga mempunyai beberapa keunggulan dan kelemahan yaitu sebagai berikut:

- 1) Keunggulan Pencatatan Akuntansi Secara Kas Basis
 - a) Metode kas basis digunakan untuk pencatatan pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan.
 - b) Beban/biaya belum diakui sampai adanya pembayaran secara kas walaupun beban telah terjadi, sehingga tidak menyebabkan pengurangan dalam penghitungan pendapatata.
 - c) Pendapatan diakui pada saat diterimanya kas, sehingga benar-benar mencerminkan posisi yang sebenarnya.

- d) Penerimaan kas biasanya diakui sebagai pendapatan. Laporan Keuangan yang disajikan memperlihatkan posisi keuangan yang ada pada saat laporan tersebut.
- e) Tidak perlunya suatu perusahaan untuk membuat pencadangan untuk kas yang belum tertagih.
 - 1) Metode kas basis tidak mencerminkan besarnya kas yang tersedia.
 - 2) Akan dapat menurunkan perhitungan pendapatan bank, karena adanya pengakuan pendapatan sampai diterimanya uang kas.
 - 3) Adanya penghapusan piutang

Definisi akuntansi berbasis kas (*cash based accounting*) menurut Erlina, Omar sp dan Rasdianto (2015,11) Akuntansi berbasis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan (PSAP No. 1 paragraf 8). Fokus Pengukurannya pada saldo kas dan perubahan saldo kas, dengan cara membedakan antara kas yang diterima dan kas yang dikeluarkan. Ruang lingkup akuntansi berbasis kas ini meliputi saldo kas, penerimaan kas, dan pengeluaran kas. Keterbatasan sistem akuntansi berbasis kas adalah keterbatasan informasi yang dihasilkan karena terbatas pada pertanggung jawaban manajemen atas aset dan kewajiban.

Menurut Mardiasmo (2002) Pada penerapan akuntansi kas, pendapatan dicatat pada saat kas diterima dan pengeluaran dicatat pada saat kas dikeluarkan. Kelebihan dari cash basis adalah mencerminkan pengeluaran

yang riil, aktual, dan objektif. Namun, GAAP tidak membenarkan pencatatan dengan dasar kas karena tidak dapat mencerminkan kinerja yang sesungguhnya. Dengan cash basis, tingkat efisiensi dan efektifitas suatu kegiatan, program, dan aktivitas tidak dapat diukur dengan baik.

b. Akuntansi Kas Menuju Akrua

Erlina, Omar dan Rasdianto (2015,11) Akuntansi berbasis kas menuju akrua merupakan proses transisi. Dengan Basis ini pendapatan, belanja dan pembiayaan dicatat berdasarkan basis kas, sedangkan aset, utang, dan ekuitas dana dicatat berdasarkan basis akrua (PP No.24 tahun 2005)

SAP berbasis kas menuju akrua dinyatakan dalam bentuk PSAP dan dilengkapi dengan kerangka konseptual akuntansi pemerintahan. PSAP dan kerangka konseptual akuntansi pemerintahan dalam rangka SAP berbasis kas menuju akrua tercantum dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. SAP berbasis kas menuju akrua digunakan dalam SAP berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 menyatakan bahwa selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrua belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas. Pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrua menurut Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dilaksanakan paling lambat lima tahun. Karena itu, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 digantikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Manfaat basis kas menuju akrua berdasarkan Lampiran II PP 71 Tahun 2010 adalah:

- 1) Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- 2) Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
- 3) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- 4) Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya,.
- 5) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.

Menurut Simanjuntak (2005) basis kas menuju akrual adalah basis akuntansi yang dikembangkan di Indonesia sebagai transisi menuju basis akrual penuh, dengan cara menggunakan basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam LRA dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca. Kemenkeu (2014) dalam modulnya menyebutkan bahwa basis kas menuju akrual merupakan suatu pendekatan unik yang dikembangkan oleh Indonesia untuk dapat menyajikan empat laporan keuangan pokok yang diamanatkan UUKN dan disesuaikan dengan kondisi di Indonesia. Menurut Erlina (2015) Akuntansi berbasis kas menuju akrual merupakan proses transisi. Dengan basis ini,

pendapatan, belanja, dan pembiayaan dicatat berdasarkan basis kas, sedangkan aset, utang, dan ekuitas dana dicatat berdasarkan basis akrual (PP No. 24 tahun 2005).

Abdul Halim (2011) mengatakan menurut butir (12) dan (13) Lampiran XXIX (tentang kebijakan akuntansi) Kepmendagri Nomor 29 tahun 2002 disebutkan bahwa:

- 1) Basis/ dasar kas modifikasian (*modified cash basis*) merupakan kombinasi dasar kas dengan dasar akrual
- 2) Transaksi penerimaan kas atau pengeluaran kas dibukukan (dicatat atau dijurnal) pada saat uang diterima atau dibayar (dasar kas).

Jadi, penerapan basis akuntansi ini menuntut bendahara pengeluaran mencatat transaksi dengan kas selama tahun anggaran dan melakukan penyesuaian pada akhir tahun anggaran berdasarkan basis akrual. Pemahaman ini dapat membingungkan dan membuat banyak sekali jurnal penyesuaian yang harus dilakukan, terutama untuk jurnal pengeluaran kas untuk pengadaan aset tetap. Oleh karena itu, dilakukanlah jurnal *collary* pada saat transaksi kas terjadi, selain jurnal penerimaan dan pengeluaran kas atas tersebut.

c. Basis Akrual

Perubahan basis akuntansi dari *cash toward accrual* ke basis akrual pada entitas pemerintahan di Indonesia merupakan bentuk reformasi pengelolaan keuangan negara/daerah menuju tata kelola yang baik sebagaimana yang diamanahkan pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003.

Prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP). SAP akrual dikembangkan dari SAP yang ditetapkan dalam PP Nomor 24 Tahun 2005 yang mengacu pada *International Public Sector Accounting Standard (IPSAS)*.

Manfaat laporan keuangan berbasis akrual adalah (PP 71 tahun 2010):

- 1) penyajian informasi keuangan yang lebih informatif, terutama dalam hubungannya dengan pengukuran kinerja pemerintah terkait biaya jasa layanan, efisiensi, dan pencapaian tujuan dalam periode akuntansi terkait
- 2) memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan pemerintah untuk tujuan pengambilan keputusan; dan
- 3) mengikuti *international best practices* dari negara-negara lain dan memenuhi amanat UU bidang Keuangan Negara.

Basis akrual adalah suatu basis akuntansi dimana transaksi ekonomi atau peristiwa akuntansi diakui dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas diterima atau dibayarkan. Study Nomor 14 IFAC *Public Sector Committee* (2002) menyatakan bahwa pelaporan berbasis akrual bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja pemerintah terkait biaya jasa layanan, efisiensi, dan pencapaian tujuan. Dengan pelaporan berbasis akrual, pengguna dapat mengidentifikasi posisi keuangan pemerintah dan perubahannya, bagaimana pemerintah mendanai kegiatannya sesuai dengan kemampuan pendanaannya sehingga dapat diukur

kapasitas pemerintah yang sebenarnya. Akuntansi pemerintah berbasis akrual juga memungkinkan pemerintah untuk mengidentifikasi kesempatan dalam menggunakan sumberdaya masa depan dan mewujudkan pengelolaan yang baik atas sumberdaya tersebut. Untuk memenuhi tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-laporan operasional, aset, kewajiban, dan ekuitas.

PP Nomor 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa basis akuntansi adalah basis akrual, namun sebenarnya pemerintah Indonesia belum menerapkan akrual penuh. Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan masih gabungan antara basis kas dan basis akrual. Penyusunan anggaran daerah masih menggunakan basis kas sehingga pelaporan pelaksanaan anggaran (*budgetary report*) menggunakan basis kas yaitu untuk Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL). Sedangkan laporan keuangan (*financial*) yang berbasis akrual adalah untuk Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, dan Laporan Arus Kas (LAK) .

Penerapan akuntansi berbasis akrual diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan basis akuntansi *cash toward accrual*. Perubahan ini juga diharapkan bukan semata-mata sebagai bentuk ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (aspek administratif) semata namun merupakan bentuk tanggung jawab dan transparansi pemerintah daerah

kepada pemangku kepentingan. Manfaat bagi pemerintah daerah memberikan informasi yang lebih transparan mengenai biaya pemerintah dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Manfaat bagi masyarakat pengguna laporan keuangan untuk menilai akuntabilitas pengelolaan seluruh sumber daya oleh suatu entitas, menilai kinerja, posisi keuangan dan arus kas dari suatu entitas serta pengambilan keputusan mengenai penyediaan sumber daya pemerintah daerah.

KSAP sebagai lembaga yang berwenang menyusun standar akuntansi, pada saat perumusan dan penyusunan standar akuntansi berbasis akrual telah menyesuaikan dengan pola SAP berbasis kas menuju akrual sehingga lebih mudah bagi para pengguna standar karena para pengguna telah memiliki pemahaman dan pengalaman terhadap SAP berbasis kas menuju akrual. Pemerintah daerah selaku pengguna PP Nomor 24 Tahun 2005 masih dalam tahap pembelajaran dan perlu waktu yang cukup lama untuk memahaminya sehingga apabila SAP akrual berbeda jauh dengan SAP berbasis kas menuju akrual akan menimbulkan resistensi pengguna.

Akuntansi berbasis akrual merupakan international best practice dalam pengelolaan keuangan modern yang sesuai dengan prinsip *New Public Management* (NPM) yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan (Kemenkeu,2014). Menurut PP 71 Tahun 2010 basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Tudor dan Mutiu, (2006) berpendapat serupa mengenai definisi basis akrual yaitu pada basis akrual transaksi dicatat pada saat pemesanan dilaksanakan, terdapat penyerahan barang, atau jasa telah diberikan tanpa memperhatikan apakah kas (atau piutang) sudah benar-benar diterima atau dibayarkan. Dengan kata lain pendapatan dicatat pada saat terjadi penjualan, dan beban dicatat pada saat menerima barang atau jasa. Laughlin (2012) mendefinisikan akuntansi akrual adalah metode pencatatan transaksi yang tidak hanya dilakukan pada saat kas yang diterima atau dibayarkan dengan kas tetapi penerimaan dan pembayaran yang ditangguhkan, yang akan diterima atau dibayarkan dengan kas pada masa mendatang dapat dicatat dan seharusnya dicatat.

International Federation of Accountants-Public Sector Committee (IFAC, 2003) dalam Study 14 mengatakan bahwa manfaat penerapan akuntansi berbasis akrual adalah diperolehnya informasi, di dalam pelaporan keuangan berbasis akrual, yang memungkinkan pemangku kepentingan (stakeholder) dalam rangka menilai akuntabilitas pengelolaan seluruh sumber daya entitas serta penyebaran sumber daya tersebut, menilai kinerja, posisi keuangan dan arus kas dari suatu entitas, dan pengambilan keputusan mengenai penyediaan sumber daya, atau melakukan bisnis dengan suatu entitas.

Pada level yang lebih detil dalam Study 14, IFAC menyatakan bahwa pelaporan dengan basis akrual dapat memberikan manfaat yaitu menunjukkan bagaimana pemerintah membiayai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan

keuangannya, memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi kemampuan pemerintah saat ini untuk membiayai aktivitasnya dan untuk memenuhi setiap kewajiban dan komitmennya, menunjukkan posisi keuangan pemerintah dan perubahan posisi keuangannya, memberikan kesempatan pada pemerintah untuk menunjukkan keberhasilan pengelolaan sumber daya yang dikelolanya, dan *Simposium Nasional Akuntansi XIX, Lampung, 2016* bermanfaat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal biaya pelayanan kepada masyarakat, efisiensi dan pencapaian tujuan pemerintah.

Menurut PSAP 01, manfaat penerapan akuntansi berbasis akrual secara spesifik adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya dengan cara menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah, menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah, menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi, menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya, menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya, menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, dan menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

3. Tujuan dan Fungsi Laporan Keuangan Sektor Publik

Menurut PP 71 tahun 2010 Pelaporan keuangan pemerintahan seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

- a. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan.
- b. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya

keuangan/ ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/ kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/ defisit- Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas dan arus kas suatu entitas pelaporan.

Mardiasmo (2002) menyebutkan tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik sebagai berikut:

a. Kepatuhan dan pengelolaan (Compliance and stewardship)

Laporan keuangan digunakan untuk memberikan jaminan kepada pengguna laporan keuangan dan pihak otoritas penguasa bahwa pengelolaan sumber daya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan lain yang telah ditetapkan.

b. Akuntabilitas dan pelaporan Retrospektif (accountability and retrospective reporting)

Laporan keuangan digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik.

c. Perencanaan dan Informasi Otorisasi (Planning and authorization information)

Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan dasar perencanaan kebijakan dan aktivitas di masa yang akan datang. Berfungsi juga untuk memberikan informasi pendukung mengenai otorisasi penggunaan dana.

d. Kelangsungan organisasi (viability)

Laporan keuangan berfungsi untuk membantu pembaca dalam menentukan apakah suatu organisasi atau unit kerja dapat meneruskan menyediakan barang dan jasa (pelayanan) di masa yang akan datang.

e. Hubungan masyarakat (public relation)

Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan kesempatan kepada organisasi untuk mengemukakan pernyataan atas prestasi yang telah dicapai kepada pemakai yang dipengaruhi, karyawan, dan masyarakat. Juga berfungsi sebagai alat komunikasi dengan publik dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

f. Sumber fakta dan gambaran (source of facts and figures)

Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi kepada berbagai kelompok kepentingan yang ingin mengetahui organisasi secara lebih dalam.

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Amerika (Financial Accounting Standards Board – FASB) juga turut menjelaskan tujuan laporan keuangan organisasi nirlaba. Dalam Statement of Financial Accounting Concepts (SFAC) No.4: Objectives of Financial Reporting by Non-Business Organizations, tujuan laporan keuangan dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Laporan keuangan organisasi non-bisnis hendaknya dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi penyedia dan calon penyedia sumber daya serta pengguna dan calon pengguna lainnya dalam pembuatan keputusan yang rasional mengenai alokasi sumber daya organisasi.
- 2) Memberikan informasi untuk membantu para penyedia dan calon penyedia sumber daya, serta pengguna dan calon pengguna lainnya dalam menilai pelayanan yang diberikan oleh organisasi no-bisnis serta kemampuannya untuk melanjutkan memberi pelayanan tersebut.

- 3) Memberikan informasi yang bermabfaat bagi penyedia dan calon penyedia sumber daya, serta pengguna dan calon pengguna lainnya dalam menilai kinerja manajer organisasi non-bisnis atas pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan serta aspek kinerja lainnya.
- 4) Memberikan informasi mengenai sumber daya ekonomi, kewajiban, dan kekayaan bersih organisasi, serta pengaruh dari transaksi, peristiwa dan kejadian ekonomi yang mengubah sumber daya dan kepentingan sumber daya tersebut.
- 5) Memberikan informasi mengenai kinerja organisasi selama satu periode. Pengukuran secara periodik atas perubahan jumlah dan keadaan/kondisi sumber kekayaan bersih organisasi non-bisnis serta informasi mengenai usaha dan hasil pelayanan organisasi secara bersama-sama yang dapat menunjukkan informasi yang berguna untuk menilai kinerja.
- 6) Memberikan informasi mengenai cara organisasi memperoleh dan membelanjakan kas atau sumber daya kas, mengenai utang dan pembayaran kembali utang, serta mengenai faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi likuiditas organisasi
- 7) Memberikan penjelasan dan interpretasi untuk membantu pengguna dalam memahami informasi keuangan yang diberikan.

Menurut Mardiasmo (2002), Bagi organisasi pemerintahan, tujuan umum akuntansi dan laporan keuangan adalah:

- 1) Untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial, politik, serta sebagai bukti pertanggungjawaban (*accountability*) dan pengelolaan (*Stewardship*)
- 2) Untuk Memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional.

Pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, politik, oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan untuk mendukung pembuatan keputusan ekonomi, sosial, politik, tersebut meliputi informasi yang digunakan untuk (a) membandingkan kinerja keuangan aktual dengan yang dianggarkan, (b) menilai kondisi keuangan dan hasil – hasil operasi, (c) membantu menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang terkait dengan masalah keuangan dan ketentuan lainnya, serta (d) membantu dalam mengevaluasi efisiensi dan efektivitas.

Untuk melakukan pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik diperlukan informasi akuntansi yang salah satunya berupa laporan keuangan. Meskipun laporan keuangan bukan merupakan satu –satunya sumber informasi untuk pembuatan keputusan, akan tetapi laporan keuangan sebagai sumber informasi finansial memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kualitas keputusan yang dihasilkan. Laporan keuangan merupakan tindakan pragmatis, oleh karena itu laporan keuangan pemerintah harus dievaluasi dalam hal manfaat laporan tersebut terhadap kualitas keputusan yang dihasilkan serta mudah tidaknya laporan keuangan tersebut dipahami oleh pemakai.

4. Pemakai Laporan Keuangan Sektor Publik

Menurut PP 71 tahun 2010 terdapat kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah, namun tidak terbatas pada masyarakat, wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman pemerintah

Anthony mengklasifikasikan pemakai laporan keuangan sektor publik menjadi 5 (lima) kelompok, yaitu:

- a. Lembaga pemerintah (governing bodies)
- b. Investor dan kreditor
- c. Pemberi sumber daya (resource providers)
- d. Badan pengawas (oversight bodies)
- e. Konstituen

5. Perbedaan Basis Kas Menuju AkruaI dan Basis AkruaI

Perbedaan manfaat basis kas menuju akruaI dengan basisi akruaI yaitu dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1
Perbandingan Manfaat Basis Kas dan Basis AkruaI

Kriteria	Basis Kas	Basis AkruaI
Pemahaman	Sederhana tapi tidak lazim bagi kebanyakan orang	Kompleks tapi lebih lazim bagi kebanyakan besar orang
Manipulasi	Relatif mudah untuk dimanipulasi	Mudah dimanipulasi, tergantung pada standar akuntansi dan standar audit
Memberikan informasi yang menyeluruh	Hanya informasi terkait dengan kas	Informasi terkait dengan kas dan juga informasi tambahan
Bermanfaat dalam pengelolaan arus kas	Hanya menyediakan informasi dasar	Menyediakan informasi tentang kas dan komitmennya
Pengelolaan aset	Tidak menyediakan informasi	Menyediakan informasi

non-keuangan	tersebut	mengenai aset
Dapat diperbandingkan	Negara-negara pengguna basis kas memiliki format yang berbeda-beda sehingga tidak konsisten dengan negara lain	Negara-negara pengguna basis akrual menggunakan standar akuntansi yang berbeda-beda sehingga tidak konsisten dengan negara lain
Mengukur keberlanjutan kebijakan fiskal	Sangat terbatas	Bermanfaat, namun harus ditambahkan dengan informasi lain
Kredibilitas	Terbatas	Lebih familiar untuk menilai instansi dan kreditur
Dasar bagi penentuan strategi fiskal	Terbatas	Bagus, jika digunakan dengan informasi mengenai kas
Akuntabilitas	Terbatas	Menyediakan informasi tersebut
Dasar bagi penentuan harga barang dan jasa	Terbatas	Bagus
Menghalangi tindakan kecurangan dan korupsi	Terbatas	Lebih bagus daripada basis kas, tergantung pada lingkungan pengendalian dan aspek lainnya
Implementasi	Biaya sistem informasi tinggi	Biaya bisa lebih rendah, namun diperlukan biaya ekstra untuk identifikasi dan penilaian aset dan komponen lain
Keberlanjutan operasi	Skill yang diperlukan rendah, namun diperlukan jumlah personel yang banyak	Mudah untuk dipertahankan dan mengajari operator

Sumber: Athukorala & Reid dalam (Sousa et.al, 2012).

Menurut Mardiasmo (2002), Perbedaan antara akuntansi berbasis kas dengan akuntansi berbasis akrual dapat dilihat sebagai berikut:

- 1) Basis Kas: $\text{Penerimaan kas} - \text{pengeluaran kas} = \text{Perubahan kas}$
- 2) Basis Akrual: $\text{Pendapatan (income)} - \text{Biaya} - \text{biaya} = \text{Rugi / laba (Surplus/ defisit)}$
- 3) Pendapatan (Income): $\text{Penerimaan kas selama satu periode akuntansi} - \text{saldo awal piutang} + \text{saldo akhir piutang}$
- 4) Biaya: $\text{Kas yang dibayarkan selama satu periode akuntansi} - \text{saldo awal piutang} + \text{saldo akhir piutang}$

Perbedaan Kerangka Konseptual adalah ditambahkan ketentuan untuk menyusutkan aset tetap (kecuali aset tertentu seperti tanah) dan penjelasan mengenai entitas akuntansi yaitu unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan. Perbedaan selanjutnya adalah jumlah laporan basis akrual yang menjadi tujuh laporan dari yang semula empat. Pengakuan belanja pada kerangka konseptual diubah menjadi pengakuan belanja dan beban di mana beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa (basis akrual) dan belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari kas daerah (basis kas). Selanjutnya perbedaan dalam kerangka konseptual adalah unsur-unsur dari tujuh laporan keuangan pokok. Perbedaan pada PSAP 01 adalah ditambahkan definisi LO dan cara penyajiannya. LO dibahas lebih rinci dalam PSAP 12. Pembahasan tersebut meliputi ruang lingkup, manfaat, periode pelaporan dan struktur pelaporan. Pembahasan tersebut meliputi ruang lingkup, manfaat, periode pelaporan dan struktur pelaporan.

Akuntansi berbasis akrual membedakan antara penerimaan kas dan hak untuk mendapatkan kas, serta pengeluaran kas dan kewajiban untuk membayarkan kas. Oleh karena itu, dengan sistem akrual pendapatan dan biaya diakui pada saat diperoleh (*earned*) atau terjadi (*incurred*), tanpa memandang apakah kas sudah dikeluarkan atau dikeluarkan.

6. Perdebatan Penggunaan Basis AkruaI dalam Pemerintah Daerah

Perdebatan tentang implementasi sistem akuntansi yang menyerupai sektor privat untuk pemerintah telah ada sejak tahun 1970-an (Harun dan Kamase, 2012). Seiring dengan bertambahnya implementasi basis ini semakin banyak pihak yang mempertanyakan seberapa pentingnya basis akruaI diterapkan pada sektor publik. Menurut Khan dan Mayes (2009) pada level kebijakan makroekonomi, pentingnya akuntansi akruaI muncul dari fakta bahwa basis ini mengukur aset dan kewajiban yang relevan dengan keseluruhan kebijakan fiskal dan kesinambungan fiskal. Keputusan untuk pindah ke basis akruaI mungkin terlihat tanpa masalah, karena akuntansi akruaI merupakan basis terbukti bermanfaat di sektor privat. Namun demikian, perbedaan sifat antara organisasi sektor publik dengan sektor privat dapat menciptakan kendala dan keterbatasan dalam proses pelaksanaannya.

Beberapa perbedaan tersebut adalah (Hassan, 2013) organisasi sektor publik tidak dimaksudkan untuk membuat keuntungan, dengan demikian, gaya akuntansi yang terutama ditujukan untuk mengukur keuntungan tidak tepat diterapkan di sektor publik. Perbedaan selanjutnya adalah pemerintah memiliki kekuatan hukum untuk menarik pajak dari masyarakat dan untuk mengelola sumber daya pemerintah sementara di sektor swasta tidak ada kekuatan hukum seperti itu. Transaksi di sektor publik adalah transaksi di mana pendapatan yang diterima dari masyarakat namun tidak secara langsung dapat memberikan nilai atau manfaat yang setara dalam hal pelayanan publik, akibatnya prinsip *matching concept* tidak berlaku. Pemerintah juga memiliki

tanggung jawab yang lebih luas dan juga ruang lingkup *stakeholder* yang lebih luas, serta beraneka ragamnya jenis aset dalam organisasi sektor publik (misalnya aset militer dan aset bersejarah) yang tidak digunakan untuk menghasilkan pendapatan.

Jarang ada penelitian mengenai basis akrual yang dapat menjelaskan bagaimana cara mengimplementasikan basis akrual dan pengaruh apa yang dapat dirasakan setelah proses implementasi selesai (Carlin, 2004). Hassan (2013) menyarankan beberapa hal berikut harus terpenuhi terlebih dahulu agar implem entasi basis akrual tidak berakhir dengan sia-sia yaitu menciptakan teknologi informasi yang mendukung basis akrual dan ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas.

Berikut ini adalah pendapat penelitian-penelitian yang mendukung basis akrual diterapkan pada sektor publik: (Hassan, 2013) yaitu (1) basis akrual berhasil digunakan di sektor privat, sehingga basis ini masuk akal jika digunakan di sektor publik. (2) Akuntansi akrual memberikan informasi keuangan yang lebih baik untuk dasar akuntabilitas pemerintah. Laporan keuangan dari akuntansi akrual diyakini lebih komprehensif, sederhana dan mudah dimengerti, sulit untuk dimanipulasi, dan lebih dapat dibandingkan dan konsisten (Athukorala dan Reid, 2003). (3) Pemerintah akan mampu mengukur kegiatannya misalnya dengan memisahkan antara biaya sekarang dan biaya modal (Athukorala dan Reid, 2003). (4) Adopsi pelaporan akrual akan meningkatkan transparansi, baik transparansi internal maupun eksternal

(OECD, 1993). Peningkatan transparansi internal akan mendorong kinerja organisasi, salah satunya melalui pengalokasian sumber daya yang lebih baik. (5) Basis akrual memungkinkan organisasi untuk mengidentifikasi biaya-biaya dari berbagai kegiatan yang dilakukan, sehingga organisasi dapat lebih efisien, mengalokasikan sumber daya lebih baik dan peningkatan kinerja. (6) basis akrual mendukung pengelolaan likuiditas yang lebih baik, memberikan dasar untuk menentukan harga produk dan layanan, dan memberikan informasi untuk mengelola sumber daya.

Selain perbedaan sifat seperti yang dijelaskan sebelumnya, permasalahan pada proses implementasi menyebabkan ada beberapa pihak yang tidak mendukung penggunaan basis akrual untuk organisasi sektor publik. Hassan (2013) merangkum pendapat dari penelitian yang tidak mendukung penggunaan basis akrual yaitu (1) perubahan akuntansi akrual selalu terhubung dengan reformasi sektor publik lainnya sehingga harus dilihat sebagai bagian dari reformasi. (2) Implementasi basis akrual sulit dan mahal. Pelaksanaan akuntansi akrual membutuhkan sistem akuntansi dan teknologi yang rumit. Selain itu, kadang-kadang pemerintah kekurangan personil akuntansi berkualitas yang dapat mengelola sistem. (3) Berbeda dengan klaim *NewPublic Management* (NPM), dengan menerapkan akuntansi akrual, peran manajerial dan politik dalam lingkungan pemerintahan menjadi kurang jelas. (4) Pelaksanaan akuntansi akrual di sejumlah sektor publik menghasilkan laporan keuangan yang justru membingungkan para penggunanya. (5) Basis akrual, seperti basis akuntansi lain, masih rentan

untuk dimanipulasi (Newberry, 2002). Argumen ini juga tidak menyetujui klaim bahwa basis akrual menawarkan transparansi yang lebih besar. (6) Beberapa bukti penelitian yang menunjukkan bahwa biaya penerapan akuntansi berbasis akrual dan pelaporannya mungkin memiliki biaya yang lebih besar daripada manfaat yang diterima (Jones dan Puglisi, 1997).

7. Penelitian terdahulu

Barries & Feriyono (2016) Penelitian yang dilakukan oleh Barries & Feriyono menunjukkan bahwa basis akrual, menurut responden, lebih bermanfaat daripada basis kas. Hasil tersebut sesuai dengan PP '71 Tahun 2010 yang mengatur tentang SAP berbasis akrual. Kementerian Keuangan Republik Indonesia juga menyatakan dalam Modul Gambaran Umum Akuntansi Berbasis Akrual bahwa basis akrual dapat memberikan informasi yang lebih baik dalam hal posisi keuangan pemerintah daerah, informasi mengenai hak dan kewajiban Pemerintah Daerah, dan dalam rangka mengevaluasi kinerja pemerintah daerah terkait biaya jasa layanan, efisiensi, dan pencapaian tujuan.

Sousa, et.al (2012) melakukan penelitian tentang manfaat informasi akuntansi yang berbasis akrual pada organisasi sektor publik di Brazil. Secara garis besar para pengguna laporan keuangan dan penyusun laporan keuangan beranggapan bahwa perubahan dari basis kas menjadi basis akrual akan lebih memberikan informasi yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan dan manajemen entitas.

Nirmala,et.al (2014) menyebutkan bahwa perubahan basis akuntansi sektor publik dari basis kas menuju akrual menjadi basis akrual disebabkan oleh kelemahan basis kas dalam menghasilkan informasi yang cukup untuk pengambilan keputusan (misalnya informasi tentang utang dan piutang). Nirmala, et.al (2014) juga menjelaskan bahwa informasi yang dihasilkan basis akrual lebih tepat untuk menggambarkan biaya operasi yang sebenarnya (full costs of operation), dapat menghasilkan informasi yang dapat diandalkan dalam informasi aset dan kewajiban dan dapat menghasilkan informasi keuangan yang komprehensif tentang pemerintah. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan basis akrual, maka pemerintah daerah dapat menghasilkan keputusan internal yang tepat karena pemerintah daerah memperoleh informasi yang lebih baik dan komprehensif terkait dengan sumber daya ekonominya.

Menurut Salvatore dan Gesso (2013) akuntansi akrual memberikan informasi lengkap tentang aset organisasi publik dan meningkatkan kuantitas dan kualitas informasi yang dihasilkan oleh sistem akuntansi. Selain itu, model akuntansi akrual memberikan informasi tentang hasil yang diperoleh (pendapatan dan biaya), yang dapat digunakan untuk meningkatkan komunikasi dengan para pemangku kepentingan, untuk lebih mengevaluasi kinerja dan untuk mengukur dampak dari kebijakan publik. Dengan demikian, model ini memungkinkan manajemen untuk membuat pilihan yang lebih rasional dan efisien.

Etrin (2012) membahas implementasi basis akrual dalam basis *cash towards accrual* pada laporan keuangan 35 pemerintah kota tahun anggaran 2007 – 2009. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa penyajian pos pos akrual tersebut yang belum memadai, dikarenakan oleh kurangnya peraturan teknis yang detail, dan ketidaksiapan pemkot untuk melaksanakannya. dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan basis akrual belum mampu memberi manfaat secara maksimal terhadap pengambilan keputusan.

8. Hubungan Basis Akuntansi dengan Pengambilan Keputusan Internal

Suardjono (2013) menyatakan bahwa tujuan pelaporan keuangan salah satunya digunakan untuk membuat keputusan-keputusan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya (alam, fisis, manusia, dan finansial), mengarahkan dan mengendalikan sumber daya fisis dan manusia suatu organisasi secara efektif. Pengambilan keputusan mengandung arti pemilihan alternatif terbaik dari sejumlah alternatif yang tersedia.

Basis akrual digunakan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah dikarenakan dalam basis akrual memungkinkan pengungkapan informasi mengenai kegunaan yang lebih besar untuk pembuatan keputusan seperti penyusunan anggaran dan menentukan fee (Nogueira et al. 2013)

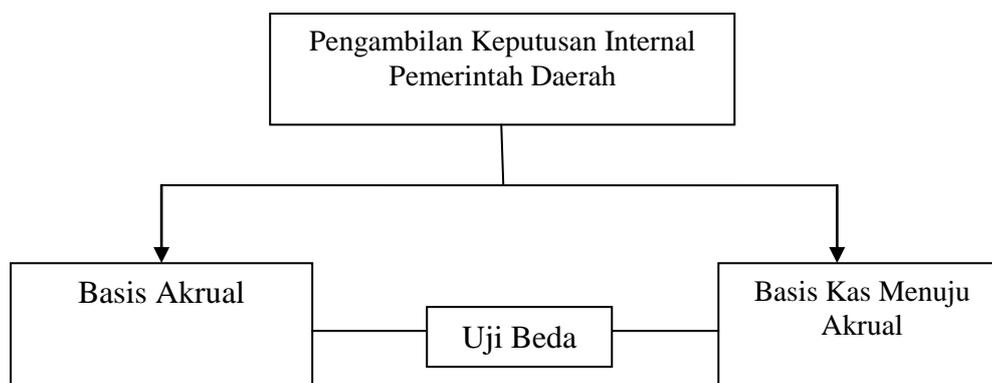
Menurut Salvatore dan Gesso (2013) akuntansi akrual memberikan informasi lengkap tentang aset organisasi publik dan meningkatkan kuantitas dan kualitas informasi yang dihasilkan oleh sistem akuntansi. Selain itu, model akuntansi akrual memberikan informasi tentang hasil yang diperoleh

(pendapatan dan biaya), yang dapat digunakan untuk meningkatkan komunikasi dengan para pemangku kepentingan, untuk lebih mengevaluasi kinerja dan untuk mengukur dampak dari kebijakan publik. Dengan demikian, model ini memungkinkan manajemen untuk membuat pilihan yang lebih rasional dan efisien.

B. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai penelitian yang akan dilakukan. Dari kerangka konseptual akan terlihat langkah-langkah yang akan dilakukan dalam penelitian. Peneliti kali ini akan meneliti mengenai Analisis Manfaat Basis Akrual dan Basis Kas Menuju Akrual dalam Pengambilan Keputusan Internal Pemerintah Daerah.

Gambar 1.
Kerangka Konseptual



Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi basis akuntansi mana (basis akrual atau basis kas menuju akrual) yang menurut para manajer sektor publik dan pengelola keuangan daerah dapat memberikan informasi lebih bermanfaat untuk pengambilan keputusan internal di

pemerintah daerah. Menurut Beechy (2007) basis kas mengakui atau mencatat transaksi atau kejadian hanya pada saat diterimanya kas atau pada saat kas dikeluarkan sedangkan kewajiban tidak disajikan pada laporan keuangan begitu juga dengan piutang dan aset lainnya. Tudor dan Mutiu, (2006) berpendapat mengenai definisi basis akrual yaitu pada basis akrual transaksi dicatat pada saat pemesanan dilaksanakan, terdapat penyerahan barang, atau jasa telah diberikan tanpa memperhatikan apakah kas (atau piutang) sudah benar-benar diterima atau dibayarkan. Dengan kata lain pendapatan dicatat pada saat terjadi penjualan, dan beban dicatat pada saat menerima barang atau jasa.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan basis akrual, maka pemerintah daerah dapat menghasilkan keputusan internal yang tepat karena pemerintah daerah memperoleh informasi yang lebih baik dan komprehensif terkait dengan sumber daya ekonominya.

C. Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas maka penulis membuat hipotesis sebagai berikut:

H: Terdapat Perbedaan Persepsi Manfaat Basis Akrual dan Basis Kas Menuju Akrual dalam Pengambilan Keputusan Internal Pemerintah Daerah

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan:

1. Terdapat perbedaan basis akrual dan basis kas menuju akrual dalam pengambilan keputusan internal pemerintah daerah kota Solok
2. Basis akrual lebih bermanfaat dibandingkan basis kas menuju akrual dalam pengambilan keputusan internal pemerintah daerah kota Solok

B. Keterbatasan Penelitian

1. Keterbatasan penelitian ini yaitu kuisisioner yang diberikan kepada responden menggunakan kuisisioner tertutup yaitu dimana kuisisioner yang menyajikan pertanyaan pertanyaan dan pilihan jawaban, sehingga responden hanya dapat memberikan tanggapan terbatas pada pilihan yang diberikan.
2. Meskipun peneliti sudah memberikan penjelasan yang cukup detail mengenai petunjuk pengisian dan maksud dari setiap pertanyaan yang diajukan peneliti kurang dapat mengendalikan jawaban dari responden, baik berupa pemahaman responden atas setiap item pertanyaan serta verifikasi setiap jawaban dari responden sehingga dimungkinkan terjadinya bias dalam pengambilan kesimpulan penelitian.

C. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran diharapkan untuk penelitian selanjutnya dilakukan dengan metode studi kasus dengan jumlah responden yang lebih sedikit (misalnya 5 SKPD dalam 1 Pemerintah Daerah) sehingga peneliti dapat mendampingi responden dalam pengisian kuisionernya

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani,dkk.2010. Decision Usefulness of Cash and Accrual Information: Public Sector Managers' Perceptions.Australian accounting. Review No.53 Vol.20
- Atan,dkk.2014. Accrual Accounting Change: Malaysian Public Sector Readiness. Journal of Management Research ISSN 1941-899X 2015, Vol. 7, No. 2
- Bastian.2005.*Akuntansi sektor publik:suatu pengantar*.Jakarta.Erlangga.
- BPK-RI, 2015, Kesiapan Pemerintah dalam Pelaporan Keuangan Berbasis AkruaI Tahun 2015.[http://pontianak.bpk.go.id/wp-content/uploads/2015/12/Pendapat-BPKNovember-2015-Akuntansi Berbasis AkruaI.pdf](http://pontianak.bpk.go.id/wp-content/uploads/2015/12/Pendapat-BPKNovember-2015-Akuntansi-Berbasis-AkruaI.pdf). diakses 12/4/2016
- Collier, P. M. 2006. Costing Police Services: The Politicization Of Accounting. Critical Perspectives On Accounting, 17, 57-86.
- Erlina,dkk.2015.*Akuntansi keuangan daerah berbasis akruaI*.Jakarta.Salemba Empat.
- Deloitte Public Sector Paper, 2004. Mastering the Transformation: New Public Management, Accrual Accounting, and Budgeting
- Ferryono dan Sutaryo.2016. Manfaat Basis AkruaI Dan Basis Kas Menuju AkruaI Dalam Pengambilan Keputusan Internal Pemerintah Daerah.Simposim Nasional Akuntansi.Lampung.
- Harun and Kamase, Haryono P.,2012. Accounting Change and Institutional Capacity: The Case of a Provincial Government in Indonesia, Australasian Accounting Business and Finance Journal, Vol. 6, issue 2,2012.
- Hassan, M. M., 2013. Debates on accrual accounting in the public sector: A discrepancy between practitioners and academicians. In Seventh Asia Pacific interdisciplinary research in accounting conference-APIRA Kobe.
- Halim dan Muhammad syam kusufi.2012. *Akuntansi keuangan daerah* (edisi4). Jakarta.Salemba Empat.
- Nirmala, T. P, Alfian, M., Sari, Y. P., 2014.Kegunaan Pelaporan Keuangan untuk Pembuatan Keputusan Internal: Studi pada Inspektorat JenderalKementerianPerdagangan. Jurnal Akuntansi & Investasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sebelas Maret Vol. 15 no.1 Januari 2014.

- International Federation of Accountants (IFAC), 2003. Study 14, Transition to the Accrual Basis of Accounting: Guidance for Governments and Government Entities (Second Edition)
- Jones, S., dan Puglisi, N., 1997. The Relevance of AAS 29 to the Australian Public Sector: A Cause for Doubt? *Abacus*, Vol. 33 No.20
- Kementrian Keuangan, 2014. Modul Penerapan Akuntansi Berbasis akrual. <http://keuda.kemendagri.go.id/pages/view/20-modul-penerapan-akuntansi-berbasisakrual>. diakses tanggal 12 Januari 2016.
- Saosa,dkk.2010. Accrual Basis Accounting in the Brazilian Public Sector: Empirical Research on the Usefulness of Accounting Information. *ISSN. R. Cont. Fin. – USP, São Paulo*, v. 24, n. 63, p. 219-230, set./out./nov./dez. 2013.
- Suwardjono,2013.*Teori Akuntansi.Perekayasaan Pelaporan Keuangan*.BPFE Yogyakarta.
- Sistem perbendaharaan dan anggaran negara, 2016. <http://www.span.depkeu.go.id/content/menyongsong-penerapan-akuntansi-pemerintah-berbasis-akrual-dalam-span>. Diakses tanggal 29 maret 2017